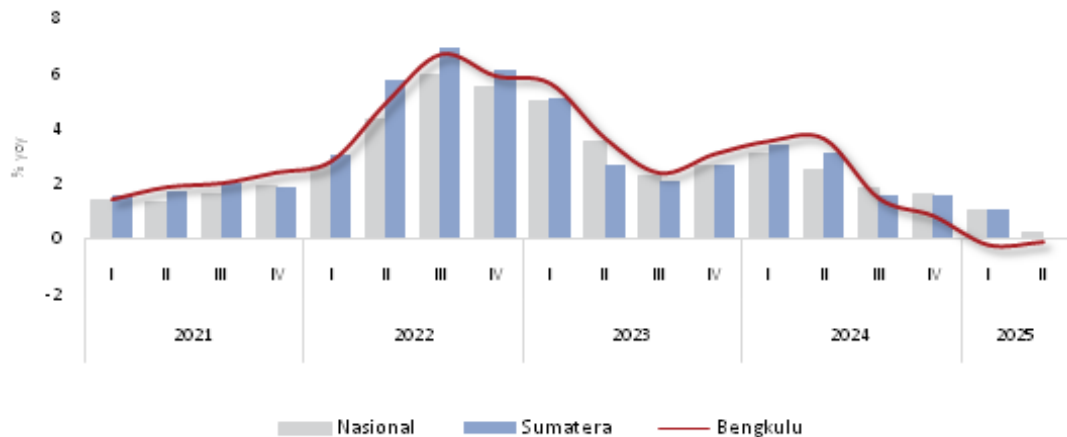


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Realisasi inflasi gabungan Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2025 tercatat sebesar -0,10% (yoy), atau meningkat jika dibandingkan dengan inflasi triwulan I 2025 yang sebesar -0,22% (yoy). Tingkat inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2025 tercatat berada di atas realisasi inflasi nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 0,19% dan 1,48% (yoy).



% yoy	Tw I 2025	Tw II 2025
Bengkulu	-0.21	-0.10
Nasional	1.03	0.19
Sumatera	1.10	1.48

2. IHK Gabungan 2 Kota IHK Provinsi Bengkulu pada Juni 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,53% (mtm), lebih dalam dibandingkan deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,26% (mtm). Angka realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar -0,12% (mtm), dan realisasi tersebut lebih dalam dari inflasi nasional sebesar 0,19% (mtm). Tekanan inflasi tertinggi pada triwulan II 2025 terjadi pada bulan April 2025 sebesar 1,31% (mtm). Sementara itu, tekanan deflasi terdalam terjadi pada bulan Juni 2025 dengan capaian inflasi sebesar 0,53% (mtm)

INFLASI IHK (%)	2024	2025		
	Jun	Apr	May	Jun
mtm	-0,74	1,31	-0,26	-0,53
yoy	3,64	0,96	0,39	-0,10

Sumber: BPS, diolah (berdasarkan tahun dasar 2022)

APR 2025	INFLASI (MTM)	MAY 2025	INFLASI (MTM)	JUN 2025	INFLASI (MTM)
KOMODITAS INFLATOR	(ANDIL % MTM)	KOMODITAS INFLATOR	(ANDIL % MTM)	KOMODITAS INFLATOR	(ANDIL % MTM)
TARIF LISTRIK	0,84	DAGING AYAM RAS	0,07	DAGING AYAM RAS	0,05
CABAI MERAH	0,26	ANGKATAN UDARA	0,03	SEPEDA MOTOR	0,05
ANGKUTAN UDARA	0,10	TARIF PULSA PONSEL	0,03	ANGKUTAN UDARA	0,04

Berdasarkan kelompoknya, deflasi pada bulan triwulan II 2025 terutama disebabkan

3.

oleh kelompok pendidikan dengan andil (mtm) sebesar -0,55%. Hal ini dipengaruhi oleh terbitnya arahan Gubernur Bengkulu dimana sekolah diminta untuk tidak memungut iuran dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Lebih lanjut, pasokan cabai yang relatif tinggi baik dari petani lokal di Seluma, Rejang Lebong, dan Mukomuko, maupun dari daerah lain seperti Kerinci menyebabkan penurunan harga cabai pada periode laporan.

4. Secara spasial, inflasi IHK di Kabupaten Mukomuko sebesar -1,34% (yoy), sementara Kota Bengkulu tercatat inflasi sebesar 0,30% (yoy). Pada Kabupaten Mukomuko hal ini didorong oleh andil kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,39%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,42%; dan kelompok pendidikan sebesar 17,23%. Sedangkan, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,83%; kelompok transportasi sebesar 0,25%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,88%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,19%. Di sisi lain, pada inflasi IHK tahunan Kota Bengkulu terutama Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,37%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,28%; kelompok kesehatan sebesar 1,76%; kelompok transportasi sebesar 1,50%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,46%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,41%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,53%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi), yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,15%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,88%; dan kelompok pendidikan sebesar 7,89%.
5. Tekanan deflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2025 terutama didorong oleh kelompok Pendidikan. Penyumbang deflasi kelompok ini adalah biaya pendidikan SMA. Hal ini dipengaruhi oleh terbitnya Surat Edaran Gubernur No.00.4.4/801/Dikbud/2025 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, serta kepala SMA, SMK, dan SLB di seluruh provinsi, dimana sekolah diminta untuk tidak memungut uang bangunan, uang seragam dan uang buku tertentu serta iuran dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Di sisi lain, pasokan cabai yang relatif tinggi baik dari petani lokal Seluma, Rejang Lebong, dan Mukomuko maupun dari daerah lain seperti Kerinci, Provinsi Jambi menyebabkan penurunan harga pada periode laporan. Disamping itu, meningkatnya pasokan bawang merah dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Barat memengaruhi penurunan harga.
6. Disisi lain, deflasi lebih dalam tertahan oleh kelompok transportasi yang dipengaruhi kenaikan harga kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua karena kebijakan *opsen* pajak yang mendorong kenaikan harga kendaraan-kendaraan tersebut.

INFLASI

DEFLASI

KOMODITAS

ANDIL

KOMODITAS

ANDIL

(% YOY)

(% YOY)

APRIL 2025

Tarif Listrik

0,84

Daging Ayam Ras

-0,16

Cabai Merah

0,26

Cabai Rawit

-0,05

Angkutan Udara

0,10

Bensin

-0,03

Emas Perhiasan

0,10

Tarif Pulsa Ponsel

-0,03

Santan Segar

0,09

Telur Ayam Ras

-0,02

MEI 2025

Daging Ayam Ras

0,07

Cabai Merah

-0,27

Angkutan Udara

0,03

Cabai Rawit

-0,03

Tarif Pulsa Ponsel

0,03

Angkutan Antar Kota

-0,02

Beras

0,02

Tarif Kendaraan Travel

-0,02

Kue Kering Berminyak

0,01

Kentang

-0,02

JUNI 2025

Daging Ayam Ras

0,05

Sekolah Menengah Atas

-0,55

Sepeda Motor

0,05

Cabai Merah

-0,24

Angkutan Udara

0,04

Bawang Putih

-0,03

Mobil

0,04

Bensin

-0,02

Emas Perhiasan

0,02

Bawang Merah

-0,02

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kondisi ketidakpastian global seperti konflik geopolitik dan kondisi perekonomian negara mitra dagang strategis yang tidak menentu diperkirakan mendorong harga pangan dan energi.
2. Meningkatnya harga emas dunia di tengah ketidakpastian global.
3. Libur sekolah dan tahun ajaran baru yang dapat memberikan tekanan pada beberapa komoditas inti.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

(1) Ketersediaan Pasokan

1. Pelaksanaan pasar murah hingga 381 kali sepanjang semester 1 2025 di seluruh provinsi Bengkulu
2. Pelaksanaan Sidak Pasar bersama Sekda Provinsi Bengkulu menjelang HBKN Idul Adha di Pasar Minggu Provinsi Bengkulu (02/06).
3. *Launching* operasional Toko Pangan Ado Galo di Pasar Minggu untuk menjaga

ketersediaan pasokan beras dan sembako di pasar.

4. Pelaksanaan urban farming memanfaatkan lahan pekarangan di Kab./Kota di Bengkulu.
5. Pelaksanaan Pasar Murah TPID Provinsi Bengkulu menjelang HBKN Idul Adha di Dekranasda Provinsi Bengkulu (02-04/06).

(2) Keterjangkauan Harga

1. Pelaksanaan pasar murah hingga 381 kali sepanjang semester 1 2025 di seluruh provinsi Bengkulu
2. Pelaksanaan Pasar Murah TPID Provinsi Bengkulu menjelang HBKN Idul Adha di Dekranasda Provinsi Bengkulu (02-04/06).
3. Pelaksanaan Sidak Pasar bersama Sekda Provinsi Bengkulu menjelang HBKN Idul Adha di Pasar Minggu Provinsi Bengkulu (02/06).
4. Melakukan fasilitasi subsidi transport pada kegiatan pasar murah Kab./Kota di Bengkulu

(3) Kelancaran Distribusi

1. Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD): KAD yang dilakukan dapat memanfaatkan BUMD sebagai Pelaksana KAD, dan BUMDes serta gapoktan untuk penguatan kelembagaan; Bantuan distribusi pangan dalam kegiatan Gerakan Pasar Murah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan.
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah sebagai upaya memperpendek rantai perdagangan komoditas pangan dan mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan termasuk ke daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)
3. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) bersinergi antara Bank Indonesia, Pemda, dan *Stakeholders* lainnya terutama untuk menyediakan pangan murah dengan subsidi ongkos angkut.

(4) Komunikasi Efektif

1. Himbauan kepala daerah kepada masyarakat untuk berbelanja bijak dan memastikan pasokan tetap mencukupi selama dan paska HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
 2. Melaksanakan koordinasi TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota serta TPIP untuk mengendalikan stabilitas harga.
 3. Penguatan data stok pangan dan alur distribusi pangan sebagai basis pengambilan kebijakan.
 4. Melaksanakan pembinaan *Capacity Building* TPID melalui FGD dan *best practices* daerah lain.
 5. Sinkronisasi program ekonomi syariah mendukung GNPIP melalui kompetisi bertemakan komunikasi pengendalian inflasi
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Percepatan dan perluasan Program Makan Bergizi Gratis, yang memerlukan stabilitas pasokan bahan (*supply chain*).
 2. Efisiensi anggaran pada beberapa alokasi anggaran terkait dengan pengendalian inflasi baik di KL atau Pemda
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. APBD mengakomodasi kegiatan-kegiatan penanganan inflasi daerah
2. Penguatan kerjasama antar daerah untuk mempertemukan *supply* dan *demand*
3. Optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah untuk stabilisasi harga